

**PERBANDINGAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM
PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JOKO
WIDODO**

Dadang Wibowo A

**Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

Email : dadang.dark@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan koalisi partai politik pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Metode dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan di antara kedua model koalisi pemerintahan di Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Adapun persamaanya adalah *Pertama*, keduanya diusung oleh partai politik yang kurang mendapatkan suara mayoritas di parlemen. *Kedua*, model koalisi yang digunakan adalah model koalisi besar di dalam pemerintahan. *Ketiga*, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo menjadi presiden yang lunak akomodatif hal tersebut dipengaruhi oleh model koalisi yang dibentuknya dimana keduanya harus berbagi kursi jabatan di pemerintahan. Di samping adanya persamaan, ada beberapa perbedaan antara keduanya. *Pertama*, posisi jabatan di partai politik yang mengusungnya, karena hal tersebut dapat memengaruhi di dalam mengatur komunikasi antara anggota partai politik koalisi. *Kedua*, di dalam jalannya koalisi antara keduanya, lebih sedikit manuver yang di lakukan oleh anggota partai koalisi dari Joko Widodo, sedangkan pada koalisi dua periode Susilo Bambang Yudhoyono banyak terjadi manuver yang dilakukan partai anggota koalisinya.

Kata Kunci: Partai Politik, Koalisi, Pemerintahan

HALAMAN PERSETUJUAN
PERBANDINGAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM
PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN JOKO
WIDODO
SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NAMA : DADANG WIBOWO A

NIM : 20140610046

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal,



Dosen Pembimbing

Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D

NIK. 19700706199904153039

I. PENDAHULUAN

Sistem kepartaian di Indonesia pada Era Reformasi ini tergolong pada sistem pluralitas ekstrem, dimana jumlah partainya sangatlah banyak dan memiliki rentang ideologi formal yang tajam serta cenderung bergerak secara sentrifugal yang berpotensi melahirkan perpecahan menjadi partai-partai baru. Dengan perpecahan yang menimbulkan partai-partai baru ini, Indonesia menjadi negara yang menganut sistem partai politik Multipartai di dalam pemerintahan Presidensial. Untuk situasi politik multipartai itu sendiri, koalisi politik merupakan keharusan bagi partai politik manapun karena: 1) Tidak ada kekuatan politik yang memperoleh suara mutlak bila dibandingkan dengan gabungan partai-partai lain, 2) Koalisi politik menekankan adanya satu persamaan tujuan atau persepsi, juga kedekatan ideologis, 3) Pemilu multipartai mengisyaratkan adanya pola politik posisi kontra oposisi sehingga koalisi partai politik tidak bisa dihindarkan. Melihat keharusan yang timbul di atas sistem Multipartai di dalam pemerintahan Presidensial juga dapat menimbulkan "*breakdown of democratic regime*" atau dapat menimbulkan pemerintahan yang tidak efektif dan stabil. Hal ini mengisyaratkan bagaimana sistem multipartai tidak sesuai dengan sistem pemerintahan Presidensial. Ketidaksesuaian ini dikuatkan dengan alasan: (1) pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah yang dimana dapat menimbulkan kemungkinan presiden yang terpilih adalah presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di Parlemen; (2) koalisi yang terbentuk dalam sistem Presidensial cenderung bersifat rapuh dan mudah retak karena

ketidakdisiplinan partai politik koalisi. Di satu sisi partai-partai politik haruslah loyal kepada presiden. Namun disisi lain, seringkali partai anggota koalisi bermanuver di parlemen karena partai politik anggota tersebut dihadapkan pada kepentingan membangun popularitas untuk memenangkan kompetisi berikutnya (elektoralis) maupun terikat keharusan mempresentasikan aspirasi konstituen pendukungnya. Ketidakdisiplinan partai-partai politik yang ada dalam koalisi, membuat setiap saat dukungan partai di parlemen menjadi melemah dan selanjutnya bisa hadir “*minority government*”. Hal ini mengakibatkan Presiden yang merupakan *single chief of executive* di dalam sistem Presidensial tidak dapat bekerja secara efektif dikarenakan terganggu dengan konfigurasi politik di parlemen yang sangat fluktuatif. Seringnya manuver yang dilakukan oleh partai-partai politik di parlemen mengakibatkan instabilitas pemerintahan yang bisa saja berujung pada kejatuhan seseorang Presiden; (3) untuk membangun loyalitas koalisi pendukungnya, Presiden cenderung bersikap lunak-akomodatif dengan memberikan insentif kepada partai-partai koalisi pendukungnya. Hal ini menimbulkan konsekuensi dimana Presiden tidak leluasa mengambil keputusan sendiri dikarenakan lebih banyak “tersandera” oleh kepentingan koalisi partai yang mendukungnya. Partai-partai mitra koalisi itu sendiri juga akan menggunakan wewenangannya di parlemen sebagai alat untuk bernegosiasi dengan Presiden. Hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat bisa menjadi alat untuk bernegosiasi dengan Presiden terutama dalam momentum politik seperti pembentukan kabinet, reshuffle kabinet

ataupun pengambilan kebijakan yang dilakukan Pemerintah. berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan melakukan penelitian yang berhubungan tentang Perbandingan Koalisi Partai Politik Dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, dengan rumusan masalah Bagaimana Perbandingan Koalisi Partai Politik Dalam Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

B. Jenis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder serta informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Hal ini dilakukan melalui buku-buku, literatur-literatur, arsip, koran, dokumen-dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian.

C. Teknik Pengelolaan Data

Pada dasarnya pengelolaan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif. Pengelolaan data yang digunakan secara kualitatif normatif, yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, pada tahap ini data yang telah terkumpulkan akan diolah

sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.

D. Analisis Data

Setelah pengelolaan data selesai, tahap berikutnya yang dilakukan adalah menganalisis data tersebut, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian. Hasil penelitian kepustakaan akan digunakan untuk menganalisis data, kemudian data dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan di dalam penulisan skripsi ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Perbandingan Koalisi Partai Politik pada Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

Dalam dua periode masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yakni pada tahun 2004 dan 2009, Susilo Bambang Yudhoyono senantiasa melakukan koalisi dengan berbagai partai politik untuk memberikan dukungan pada pemerintahannya. Kita tahu Partai Demokrat sebagai partai yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah meraih suara mayoritas pada dua pemilu terakhir (2004 dan 2009).

Bahkan pada pemilu tahun 2004, meski berhasil menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, namun Partai Demokrat bukanlah partai pemenang pada pemilu saat itu. Perolehan suara yang didapat hanya (10,5%) kalah dari partai Golongan Karya (Golkar) dengan

suara (23%), Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) (20%), Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) (10,5%), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (9,4%), Partai Amanat Nasional (PAN) (9,6%), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (8,2%). Oleh karena itu, Partai Demokrat harus membentuk koalisi dengan beberapa partai lain untuk memenuhi syarat 20 persen, perolehan kursi parlemen pusat untuk mengajukan pasangan presiden.

Pada periode kedua, meski Partai Demokrat berhasil menjadi pemenang pemilu tahun 2009, namun perolehan suara yang didapat tidak mencapai suara mayoritas. Dengan perolehan suara 20,85%, Partai Demokrat memang memenuhi syarat minimal untuk mengajukan calon Presiden yang kemudian dimenangkan kembali oleh Susilo Bambang Yudhoyono, namun posisi partai demokrat belumlah kuat di parlemen. Hal tersebutlah yang mendasari Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk koalisi di dalam pemerintahannya dengan menempatkan beberapa kader dari partai lain untuk menduduki posisi menteri atau istilah lainnya adalah membagi-bagi jabatan di dalam pemerintahannya. Dengan membentuk koalisi besar, Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar kebijakan yang nantinya diajukan akan senantiasa mendapatkan dukungan dari semua anggota koalisi didalam parlemen.

Sedangkan pada pilpres 2014, partai PDIP yang mengusung Joko Widodo mendapatkan suara yang lebih banyak sejumlah (19,5%) dari partai politik yang lainnya namun suara dari PDIP belum mencapai 20

persen atau menjadi partai politik dengan suara mayoritas. Sama halnya yang terjadi pada dinamika koalisi era Susilo Bambang Yudhoyono, demi mendapatkan dukungan di parlemen diperlukannya suatu koalisi. Joko Widodo membangun koalisi yang terdiri dari PDIP sebagai pengusung Joko Widodo, Partai Nasdem (6,3%), PKB (8,4%), Partai Hanura (2,9%), dimana koalisi ini menguasai 207 kursi DPR RI atau (37%).

Hal ini masih kalah dengan koalisi yang dibentuk oleh Prabowo yang mendapatkan 292 kursi di parlemen. Hal tersebut menjadikan Joko Widodo sebagai presiden dengan suara minoritas di parlemen. Namun mengetahui hal tersebut, Joko Widodo menegaskan, sejak awal tidak berminat dengan koalisi yang dibangun berdasarkan kesepakatan bagi-bagi kursi kabinet seperti yang terjadi pada era sebelumnya, ataupun pada era koalisi yang dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Joko Widodo menghendaki koalisi yang dibangun lebih berdasarkan kesamaan *platform*". Oleh sebab itu Joko Widodo lebih memilih membangun koalisi yang terbilang ramping.

Dari hal tersebut dapat kita lihat perbedaan dan persamaan koalisi yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Pertama*, keduanya sama-sama diusung oleh partai politik yang tidak mendapatkan suara signifikan/mayoritas sebesar 20 persen di parlemen, karena hasil suara lebih merata antara partai politik yang menyebabkan diperlukannya koalisi. *Kedua*, model koalisi yang dibentuk oleh keduanya dapat dikatakan sama yakni model koalisi besar dengan mengakomodasi partai

anggota koalisi tersebut, meskipun diawal pemerintahan Joko Widodo menggunakan model koalisi ramping namun diperjalanannya model koalisi menjadi koalisi besar. *Ketiga*, persamaan yang terakhir, keduanya menjadi Presiden yang lunak-akomodatif dikarenakan model koalisi yang dibentuk akibat dari sistem multipartai pada sistem presidensial. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian posisi-posisi jabatan strategis terhadap partai-partai pengusungnya dengan harapan segala kebijakan dapat berjalan mulus. Tidak lepas dari persamaan yang ada terdapat pula perbedaan antara dinamika koalisi antara keduanya. *Pertama*, posisi jabatan di partai politik pengusung keduanya, kita tahu Susilo Bambang Yudhoyono adalah ketua umum Partai Demokrat yang mengusung dirinya menjadi Presiden dalam dua periode, sedangkan Joko Widodo merupakan kader dari Partai PDIP yang mengusungnya menjadi Presiden tahun 2014. Dari hal tersebut dapat mempengaruhi di dalam komunikasi politik yang dibangun di dalam koalisi yang dibentuk. *Kedua*, di dalam jalanya koalisi pada pemerintahan keduanya, dapat dikatakan koalisi yang dibentuk oleh Joko Widodo lebih sedikit manuver yang dilakukan anggota partai politik hal tersebut dikarenakan partai politik yang bergabung di dalam koalisi tersebut lebih patuh di dalam mendukung program nawa cita yang dicanangkan oleh Joko Widodo pada masa Kampanye terdahulu. Sedangkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, manuver yang dilakukan oleh partai politik anggota koalisi sangatlah banyak, dikarenakan sikap kurang disiplin partai politik di dalam mendukung

sepenuhnya program yang dicanangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selain itu efek transisi ketatanegaraan yang ada di Indonesia yang pada awalnya condong kepada parlementer menjadi presidensial.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara model koalisi di Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Dilihat dari persamaannya yaitu *Pertama*, keduanya diusung oleh partai politik yang tidak mendapatkan suara signifikan/mayoritas sebesar 20 persen di parlemen. Karena hasil suara lebih merata antara partai politik yang menyebabkan diperlukannya koalisi. *Kedua*, model koalisi yang digunakan adalah model koalisi besar di dalam pemerintahan, meskipun Joko Widodo di awal pemerintahan menggunakan model koalisi ramping yang berbeda dengan Susilo Bambang Yudoyono yang dari awal pemerintahannya menggunakan model koalisi besar selama dua periode. *Ketiga*, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo menjadi presiden yang lunak-akomodatif karena dipengaruhi oleh model koalisi yang dibentuknya dimana keduanya harus berbagi kursi jabatan di pemerintahan. Di samping adanya persamaan, ada beberapa perbedaan antara keduanya. *Pertama*, posisi jabatan di partai politik yang mengusungnya, kita tahu Susilo Bambang Yudhoyono menjabat selaku ketua umum di Partai Demokrat yang mengusung dirinya, sedangkan Joko Widodo hanya seorang kader Partai PDIP yang

mengusungnya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi di dalam mengatur komunikasi antara anggota partai politik koalisi. *Kedua*, di dalam jalannya koalisi antara keduanya, lebih sedikit manuver yang dilakukan oleh anggota partai koalisi dari Joko Widodo, sedangkan pada koalisi dua periode Susilo Bambang Yudhoyono banyak terjadi manuver yang dilakukan partai anggota koalisinya atau dapat dikatakan Joko Widodo lebih mampu untuk menenangkan konflik politik yang timbul pada masa pemerintahannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Chaidar, 2005, *Pemilu Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Vs Partai Sekuler*, Jakarta, Darul Fallah.

A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, Edisi Ketiga*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Cochran, 2008, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Daniel Dhakidae(ed.), 1999, *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program*, Jakarta, Kompas.

Deliar Noer, 1999, *et.al, Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Partai Islam dari Pra-Pemilu 1999 sampai pemilihan Presiden*, Jakarta, ALVABET.

Eftiza, 2012, *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Jakarta, Alfabeta.

Firman Subagyo, 2009, *Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, Jakarta, PT. Wahana Semesta Intermedia.

Hafied Cangara, 2016, *Komunikasi Politik (Konsep-Teori dan Strategi)*, Jakarta, Rajawali Pers.

Hanta Yuda, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati: Dilema ke Kompromi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Jimmy Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.

Jimmy Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

K.CWheare, 1966, *Modern Constitution*, Oxford University Press, Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Hardani, 2003, *Konstitusi-konstitusi Modern*, Surabaya, Pustaka Eureka.

Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Miriam Budiardjo, 1981, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor.

Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, 1988, *Ilmu Negara, Cetakan ke-2*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, UI Press.

Nukhtoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group.

Ramlan Surbakti, 1998, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.

Sigit Pamungkas, 2011, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta, *Institute for Democracy and Welfarism*.

Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, LIBERTY.

Jurnal

Efriza, 2016, Sistem Presidensial Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945; Studi Kasus Kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi, *Jurnal Renaissance* Vol.1, No.01.

Siska Yuspitasaki, 2012, Sistem Multipartai di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009, *Jurnal Dinamika Politik* Vol.1, No.1, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan. ISSN: 2302-1470.

HM. Thalhah, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Bojonegoro, Jawa Timur, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 16 Juli 2009.

Muntoha, 2009, Demokrasi dan Negara Hukum, *Jurnal Hukum*, No. 3, Vol. 16, Juli 2009, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Arbi Sanit, 2003, Perubahan Mendasar Partai Politik, dalam Mahrus Irsyam dan Lili Romli, ed., *Menggugat Partai Politik*, Jakarta, *Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI*.

Syamsudin Haris, 2011, Koalisi Dalam Sistem Demokrasi Indonesia : Faktor-faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono, *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 8, No. 1, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Mikael Loi, 2016, Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-JK, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 5, No. 1, Jurusan FISIP Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, ISSN. 2442-6962.

R. Widya Setiabudi Sumadinata, 2016, Dinamika Koalisi Partai-partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun

2014, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 2, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, ISSN. 2502-9185.

M. Faishal Aminuddin, 2015, Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pemilu 2009, *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 1, Jurusan FISIP Universitas Brawijaya, Malang

Indra Pahlevi, 2014, Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia, *Jurnal Politik*, Vol. 5, No. 2, Jurusan FISIP Universitas Indonesia.